

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, dalam ajarannya, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Thabrani,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ . رواه الطَّبْرَانِ .

“*sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas).*”(HR Thabrani)¹

Nilai sosial Islam, mengatur perilaku, kehidupan keluarga, tetangga, pengurusan harta kekayaan, anak yatim dan piatu, dan seterusnya. Al-Qur'an memperhatikan perbedaan ras, warna kulit, bahasa, kekayaan dan lain sebagainya yang menjadi rencana sosial. Tapi tidak satupun dari ketentuan ini yang berlebihan atau memaksakan ketidakmampuan. Tidak ada elemen masyarakat yang memiliki hak istimewa, dimana digambarkan

¹ Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Depok: Gema Insani 2008), hlm 1

bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertaqwa sebagai tanda kemakmuran hidup di dunia dan akhirat²

Islam menghendaki para pengikutnya agar terhindar dari berbagai hal-hal yang berdampak buruk dalam kegiatan muamalah akibat tidak meratanya persebaran harta kekayaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Rasulullah Melarang jual beli dengan batu kerikil, (hasan, jual beli suatu barang yang dipilih atau ditentukan dengan melempar batu kerikil) dan jual beli *gharar* (HR. Muslim)³

Jika diamati secara seksama, sesungguhnya umat Islam itu disamping memiliki berbagai persoalan yang berat dan kompleks, seperti persoalan pemahaman keagamaan yang belum lurus, persoalan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar umat, persoalan kebodohan, dan sebagainya, umat Islam pun memiliki banyak potensi yang belum digali dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, sekaligus untuk membangkitkan kembali peradaban Islam di era sekarang. Misalnya potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang tersebar merata di negara-negara mayoritas penduduknya muslim, seperti Indonesia.⁴

² Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme" dalam: *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. V, No. 1 Juni 2015*. Hlm. 30

³ Muhammad Ngasifudin dan Abdul Salam, "Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota dalam Perspektif Ekonomi Syariah" *Vol. V, No. 1 Juni 2015*. Hlm.74

⁴ M. Irwan dan Ihsan Ro'is *Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 03, No. 01, Juni 2016: 65-81* p-ISSN: 2355-438X; e-ISSN: 2407-3709

Lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait antara pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Lembaga pengelola menginginkan adanya kepercayaan pemberi dana. Penerima dana menginginkan adanya transparansi pengelolaan dana

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat infak atau sedekah harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung serah terima zakat, infak atau sedekah tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh munfiq tidak mengenai sasaran yang tepat.

Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada di lingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang

lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.

Setiap orang selalu melihat pengelolaan setiap lembaga terhadap apa yang dikelolanya, semakin baik pengelolaannya maka akan semakin baik penilaian orang terhadap lembaga tersebut, tentunya kepercayaan atas pengelola tersebut akan lebih terjamin.

Selain beberapa hal di atas, seringkali terjadi penipuan juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Penipuan dan pemalsuan, Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat menimbulkan perpecahan dan percekocokan.⁵

Dewasa ini pandangan negative, atau kraguan terhadap pengelolaan dana infak, telah mendapat jawaban positif atas kehadiran pengelolaan KOIN NU. KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama) adalah sebutan untuk program penggalangan dana infak oleh organisasi Nahdlatul Ulama yang diprakarsai oleh LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama). Meskipun berada dibawah naungan LAZISNU, namun kepengurusan program KOIN NU ini dibentuk untuk mengelola dana infak secara khusus.

⁵ Kurniati, "Strategi Adaptasi Pedagang Angkringan dalam Mempertahankan Eksistensi Hidup Studi di Kawasan Jl. KH. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Dalam: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. V. No. 2 Desember 2015. Hlm. 178

Pengelolaan KOIN NU yang terbilang sangat sukses adalah pengelolaan KOIN NU di Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Pengelola tidak malu mengumpulkan uang receh dalam KOIN NU. Uang seratus rupiah, dua ratus rupiah, dan seterusnya. Dikumpulkan dari warga kecil, tetapi menjadi kekuatan yang sangat besar. Bahkan saat ini, NU Sragen dengan program KOIN NU menjadi percontohan nasional. Program dari KOIN NU juga jelas, menyejahterakan warga kecil, bisa berupa santunan, beasiswa, pemberdayaan ekonomi, dan lainnya.⁶

Pengelolaan KOIN NU menjadi salah satu program unggulan NU Sragen yang meraih sukses besar dan buming sampai ke tingkat nasional. Dilihat dari nama programnya, KOIN NU merupakan kegiatan pemanfaatan uang receh yang kadangkala kurang begitu dianggap penting, untuk diinfakkan kepada Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk mewujudkan keberdayaan Jama'ah dan Jam'iyah. Sejak disosialisasikannya program ini sekitar satu tahun, pengelola KOIN NU Sragen telah mengumpulkan dana infak sebesar Rp 1.660.591.175 (satu milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).⁷

Uang sebanyak itu diperoleh dari 18 MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) atau sama dengan 18 Kecamatan di kabupaten Sragen. Kesuksesan ini tidak terlepas dari kerja keras pengurus dalam

⁶“Berangkat dari yang kecil”, *Majalah Bangkit*, Maret 2017. Hlm. 3

⁷ “KOIN NU Sragen Capai Angka 1,6 M”, *Majalah Bangkit*, Maret 2017. Hlm. 16

mensukseskan program 1000 KOIN untuk kemandirian umat. Sosialisasi yang masif terus diupayakan oleh segenap elemen NU Sragen.

Perintisan awal KOIN NU, PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Sragen menyediakan 1000 kotak KOIN yang dibagikan kepada warga. Saat ini telah tersedia sekitar 40.000 kotak yang sudah tersebar. Upaya tersebut merupakan gebrakan besar-besaran untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri⁸.

Terkumpulnya dana dari KOIN NU dalam jumlah besar, maka PCNU Sragen saat ini memiliki anggaran yang memadai untuk melakukan berbagai kegiatan organisasi. Bahkan PCNU Sragen telah mampu membeli Bus Pariwisata yang bisa disewakan kepada masyarakat untuk kepentingan sosial maupun kegiatan keagamaan.

Suksesnya KOIN NU Sragen bukan berarti tanpa kendala. Pada awal sosialisasi, banyak warga yang mempertanyakan kekonsistenan program tersebut, mengingat banyak program NU yang macet di tengah jalan. Dari pengurus sendiripun muncul rasa kurang semangat dan kurang percaya diri bahwa program tersebut akan berjalan.

Tingkat kepercayaan masyarakat atas program KOIN NU di Sragen begitu besar. Mengingat tim KOIN NU Sragen bekerja secara profesional dan akuntabel. Mereka melaporkan hasil perolehan KOIN secara berkala. Laporan tertulis juga diberikan kepada donator sehingga mereka bisa

⁸ *Ibid*, hlm 16

melihat hasil perolehan. Selain itu, uang yang terkumpul kemudian disimpan di bank sehingga aman dan terpercaya.

Suksesnya program KOIN NU di Sragen rupanya menginspirasi kepengurusan NU di wilayah lainnya, salah satunya di MWC NU Piyungan, Bantul, Yogyakarta.

Program KOIN NU di Piyunga memiliki koordinator di setiap dusun. Tiap koordinator mensosialisasikan KOIN NU ke warga. Setiap warga di ajak menyisihkan KOIN 500 rupiah per satu hari. Meskipun kecil, namun dampak yang akan diberikan sangat besar dan bermanfaat. Ini karena hasil KOIN yang terkumpul, dimanfaatkan untuk program-program yang lebih bermanfaat.

Bukan berarti program ini bersifat memaksa, tetapi lebih pada bentuk kerelaan dan keikhlasan. Karena itu warga Piyungan diharapkan memiliki kesadaran dan kepedulian untuk mengikuti program tersebut. Nantinya, hasil dari pendanaan yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk membangun kemandirian ekonomi . dengan begitu, NU benar-benar bisa diharapkan membawa kemaslahatan umat.⁹

Latar belakang KOIN NU di Piyungan, program ini diawali dari rasa keprihatinan terhadap pendanaan. Setiap kali NU hendak menyelenggarakan kegiatan, terkendala oleh pendanaan. Program KOIN NU selain untuk membentuk kemandirian organisasi, juga membentuk

⁹ *Ibid*, Hlm 18

jaringan yang melibatkan semua jejaring NU. Masyarakat mulai petani, pegawai, dan semua lapisannya akan dilibatkan.

Meskipun merupakan program baru, KOIN NU tetap menginduk le Lazis NU wilayah. Dengan kata lain, meskipun memiliki program sendiri, tetap bertumpu pada jalur yang sudah ada. Sebagai salah satu ciri khas NU, segala bentuk program tetap mengikuti aturan induk organisasi.

Adapun tantangan pengurus dalam menjalankan KOIN NU yaitu menjaga kepercayaan masyarakat. Keberagaman bermasyarakat memunculkan banyak reaksi, tanggapan masyarakat terhadap program ini juga beragam. Ada yang optimis, pesimis, dan meragukan. Tantangan semacam inilah yang dihadapi pengurus KOIN NU.

Salah satu bentuk nyata memberi kepercayaan masyarakat adalah dengan menyusun target yang akan di capai. Adapun program yang menjadi skala prioritas dari KOIN NU Piyungan yaitu pengadaan ambulan, program social, dan ekonomi kemasyarakatan. Salah satu bentuk aplikasinya adalah dengan memberikan santunan ke lembaga pendidikan.¹⁰

Berangkat dari fenomena pengelolaan KOIN NU di Kabupaten Sragen Jawa Tengah yang telah meraih berbagai macam prestasi, hingga terbentuknya kepengurusan KOIN NU di Kecamatan Piyungan sebagai pemula KOIN NU di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kini KOIN NU

¹⁰ *Ibid*, hlm. 12-18

Piyungan telah menunjukkan eksistensinya sebagai pengelola dana Infak yang professional meskipun tergolong baru dalam keberadaannya.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti menuangkan permasalahan dalam pengelolaan lembaga keuangan non profit atau dana ummat. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melihat dan mengkaji lebih dalam lagi terkait pengelolaan atau menegerial yang diterapkan dalam mengemban amanah dana masyarakat, di Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta, sehingga memilih judul **“ANALISIS PENGELOLAAN KOIN NU DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARI’AH (Studi Kasus Pengelolaan KOIN NU di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat didefinisikan bahwa tantangan terbesar pengelola dana masyarakat adalah sulitnya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan atau manajerial yang kurang baik. Oleh karena itu peneliti bermaksud meneliti lebih dalam bagaimana pengelolaan KOIN NU di Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta dan bagaimana pengelolaan tersebut dalam tinjauan manajemen dalam perspektif manajemen syari’ah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan KOIN NU di Kecamatan Piyungan?

2. Bagaiakah tinjauan manajemen syariah terhadap pengelolaan KOIN NU di kecamatan Piyungan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan KOIN NU di Kecamatan Piyungan.
2. Untuk mengetahui apakah manajemen KOIN NU di Kecamatan Piyungan sudah sesuai perspektif manajemen syari'ah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, hasil studi ini akan dapat menambah dan memperluasa wawasan terkait manajemen dalam perspektif syari'ah terutama pada Obyek penelitian yang diteliti.
2. Bagi institusi, Hasil penelitian dapat dijadikan referensi atau acuan kinerja pengelola kedepannya serta dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk perbaikan kinerjanya pengelolaan KOIN NU di Kecamatan Piyungan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti.